

## **Peran Perum Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**I Gde Sukrana Adi Pratama<sup>1</sup>, Ni Nyoman Satya Widari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

<sup>2</sup>Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

E-mail: [gdesukrana@gmail.com](mailto:gdesukrana@gmail.com)<sup>1</sup>, [satyawidari21@gmail.com](mailto:satyawidari21@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga ialah Teori Kebijakan Publik dan Teori Pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bulog memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Nusa Tenggara (NTB). Hal ini, dilakukan melalui pengelolaan stok beras secara optimal, melakukan operasi pasar, distribusi yang efisien, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, mitra dan pelaku distribusi. Dengan adanya penyaluran beras SPHP menekan lonjakan harga beras di masyarakat. Selain itu, adanya program Perum Bulog yaitu Raskin dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Faktor internal yang mendukung stabilitas harga beras yaitu sumber daya manusia yang andal, dukungan infrastruktur yang memadai yaitu 16 gudang penyimpanan yang strategi dan dukungan logistik dari anak perusahaan yaitu PT. Jasa Teknologistik. Faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas harga beras ialah adanya peraturan pemerintah terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi stabilitas harga beras Perum Bulog terus melakukan inovasi dan adaptasi kebijakan yang mencakup digitalisasi sistem distribusi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, perlu adanya kebijakan yang fleksibel dan inovasi yang berkelanjutan untuk menjamin harga beras yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

**Kata Kunci :** Beras, Ketahanan Pangan, Perum Bulog Stabilitas Harga, dan Stabilitas Harga

### **Abstract**

*This study aims to determine the role of Perum Bulog in maintaining rice price stability in West Nusa Tenggara Province. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection in this study uses observation methods, semi-structured interviews and documentation. The theories used to analyze the role of Perum Bulog in maintaining price stability are Public Policy Theory and Market Theory. The results of the study indicate that Bulog has a strategic and significant role in maintaining rice price stability in the Province of Nusa Tenggara (NTB). This is done through optimizing rice stock management, conducting market operations, efficient distribution, and cross-sector coordination with local governments, partners and distribution actors. With the distribution of SPHP rice, the surge in rice prices in the community is suppressed. In addition, Bulog's Raskin program and the management of Government Rice Reserves (CBP) can strengthen food security at the local level. Internal factors that support rice price stability are reliable human resources, adequate infrastructure support, namely 16 strategic storage*

*warehouses and logistics support from subsidiaries, namely PT Jasa Teknologistik. An external factor affecting rice price stability is the government regulation on the Highest Retail Price (HET). With many factors affecting rice price stability, Perum Bulog continues to innovate and adapt policies that include digitizing the distribution system and intensive coordination with all stakeholders. Overall, there is a need for flexible policies and continuous innovation to ensure stable and affordable rice prices for the people of Nusa Tenggara Barat(NTB).*

**Keywords:** *Food Security, Perum Bulog, Price Stability and Rice*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Dimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mendukung keberlangsungan hidup (Rachman dkk., 2021). Langkah penting untuk memastikan kesejahteraan suatu negara adalah menjaga stabilitas pangan. Stabilitas pangan merujuk pada keadaan dimana kebutuhan pangan suatu negara hingga tingkat individu telah terpenuhi dalam beberapa aspek yaitu: jumlah, kualitas, keamanan, kandungan gizi, pemerataan, serta keterjangkauan. Hal ini berdampak pada masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang bergerak pada bidang pertanian sehingga memiliki potensi besar dalam sektor pangan, baik dari segi produksi maupun diversifikasi komoditas (Iqbal, 2023). Beberapa komoditas pangan utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi jagung, padi, kedelai, ubi, dan beberapa hasil pangan lokal lainnya. Komoditas-komoditas tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus bagian dari dinamika ekonomi daerah. Dari berbagai komoditas tersebut, beras memiliki posisi strategis karena menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai makanan pokok, beras memiliki kandungan gizi di antaranya yaitu protein, lemak, dan khususnya karbohidrat sebagai sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, beras memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya konsumsi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Konsumsi beras di provinsi ini cenderung sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan nasi merupakan makanan utama yang dibutuhkan oleh hampir seluruh rumah tangga di setiap lapisan masyarakat. Beras yang menjadi makanan pokok utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sering menghadapi berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata, gangguan cuaca ekstrem, serta perubahan harga beras di tingkat pasar menjadi tantangan yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap komoditas ini. Selain itu, masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar menggantungkan kebutuhan pangannya pada beras turut meningkatkan tekanan terhadap produksi dan distribusi beras di wilayah tersebut (Siddik dkk., 2022). Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga beras menjadi salah satu tugas penting pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah membentuk Perusahaan Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) pada tahun 1967 dengan menjalankan tugas untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan cara pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, pelaksanaan impor pangan, pengembangan industri berbasis pangan, dan pengembangan pergudangan pangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2016. Perum Bulog menjalankan berbagai fungsi, seperti membeli gabah atau beras petani pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP), menyimpan

Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga ketika terjadi gejolak. Selain itu, Perum Bulog juga bertugas mendistribusikan beras ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil untuk memastikan ketersediaan pangan memiliki jumlah yang cukup di masing-masing daerah.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 bertujuan untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan kepada Perum Bulog mengenai kebijakan untuk membahas pengadaan dan distribusi beras oleh pemerintah agar pengadaan beras dilakukan melalui hasil produksi petani lokal, dengan kebijakan impor beras diterapkan jika pasokan dari dalam negeri tidak mencukupi. Proses pengadaan dalam negeri dimulai dari hasil produksi petani. Perum Bulog menerapkan kebijakan berupa penetapan harga dasar dan harga maksimum agar mencapai stabilitas harga beras. Kebijakan harga dasar bertujuan melindungi petani sebagai produsen dari penurunan harga gabah yang signifikan saat panen raya, sementara kebijakan harga maksimum dirancang untuk melindungi konsumen, terutama dari kenaikan harga selama periode dimana ketersediaan pangan menurun secara drastis dan dapat menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut. Konsep harga maksimum diwujudkan melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Sementara itu, konsep harga dasar diterapkan melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk dijadikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengenai harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras.

Penerapan HPP bertujuan memberikan insentif kepada petani padi dengan menjamin harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan, terutama selama panen raya. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan pendapatan petani, serta menjaga stabilitas harga gabah dan beras di pasaran. Penetapan HPP gabah dan beras didasarkan pada kualitas di tingkat petani, penggilingan, dan Gudang Perum Bulog. Kriteria kualitas HPP gabah meliputi kadar air dan kadar kotoran, sementara kualitas HPP beras ditentukan berdasarkan derajat sosoh, kadar air, butir patah, dan butir. Meskipun Perum Bulog yang telah memiliki berbagai mekanisme untuk menjaga stabilitas harga beras (Bulog, 2023). Tantangan di lapangan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya. Tantangan tersebut meliputi fluktuasi harga pasar, rendahnya serapan gabah petani oleh Perum Bulog, infrastruktur distribusi yang belum memadai, hingga persaingan dengan pelaku swasta. Dalam beberapa kasus, harga beras tetap mengalami gejolak yang signifikan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, yang menunjukkan adanya potensi masalah dalam implementasi kebijakan Perum Bulog. Hal tersebut juga berkaitan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa stabilitas harga beras dapat dicapai melalui mekanisme intervensi pasar, seperti pengelolaan stok dan operasi pasar (Proborini dkk., 2018). Namun, dalam praktiknya efektivitas intervensi Perum Bulog sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, logistik, dan mekanisme distribusi, yang belum banyak dibahas dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga oleh Perum Bulog sering kali menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan, seperti keterlambatan distribusi beras atau kurangnya cadangan beras yang cukup. Namun, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi secara spesifik bagaimana faktor-faktor ini terjadi, dampaknya terhadap petani sebagai produsen utama. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada peran Perum Bulog dalam

menekan harga saat terjadi lonjakan, intervensi jangka pendek oleh Perum Bulog, seperti operasi pasar atau pengadaan stok cadangan. Namun, masih ada kesenjangan penelitian terkait efektivitas kebijakan stabilisasi harga dalam jangka panjang, terutama dalam konteks ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan infrastruktur logistik.

Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 harga beras premium secara nasional pada bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp. 15.420/kg. Sementara itu, Fadhlurrahman (2024) menyebutkan bahwa rata-rata harga beras premium di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan sebesar 0,95%. Sepanjang tahun 2024, harga terendah tercatat sebesar Rp. 13.990/kg pada Kamis, 2 Mei 2024, sementara harga tertinggi mencapai Rp. 17.180/kg pada Jumat, 1 Maret 2024. Berdasarkan data dari tingkat kabupaten atau kota, harga beras premium bervariasi antara Rp. 13.000 – Rp. 16.000/kg. Kenaikan harga ini juga tercatat pada September 2024, di mana beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa sebesar 0,03% terhadap inflasi. Peningkatan harga dipengaruhi oleh musim kemarau yang mengurangi produksi dan pasokan beras, serta meningkatnya permintaan selama perayaan Maulid Nabi. Untuk meredam gejolak harga, Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan intervensi pasar dengan mendistribusikan beras di berbagai pasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Purnama, 2024). Pada Januari 2023, Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan rata-rata 100 ton beras per hari guna menjaga stabilitas harga beras medium (Bulog, 2023).

Menurut Setyawan dan Alamanda (2023) yang membahas terkait kedudukan dan fungsi perum bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditi jagung dari petani di kabupaten bojonegoro melalui tinjauan yuridis. Permendagri no. 7 tahun 2020 tentang harga pembelian pada tingkat petani dan acuan di tingkat konsumen sebagai dasar acuan yang telah ditetapkan permendagri, Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro. Terlaksananya penyerapan harus ada penugasan dengan kerjasama antara Kemendagri dengan Perum Bulog menyerap jagung kepada petani untuk subsidiakan ternak bagi peternak. Namun kenyataan yang terjadi perum bulog cabang bojonegoro belum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya yang dapat menstabilitaskan harga. Menurut Sipahutar dkk (2023) yang menkaji terkait peran pemerintah terhadap stabilitas harga minyak goreng sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang membahas menyatakan pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, menteri dapat menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperlakukan intervensi (campur tangan) terhadap stabilitas harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara hal ini disebabkan minyak goreng sawit banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Meskipun terdapat studi memperlihatkan kompleksitas dalam stabilisasi harga komoditas jagung dan minyak goreng sawit, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di wilayah dengan karakteristik geografis dan tantangan logistik seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beras merupakan komoditas pangan pokok yang jauh lebih krusial dalam struktur konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri lebih dalam bagaimana strategi, kebijakan, serta hambatan teknis dan struktural yang dihadapi Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penelitian ini

memperluas cakupan pendekatan melalui studi kualitatif yang berfokus pada pengalaman mitra distribusi dan pelaku logistik, yang jarang dijadikan fokus dalam studi-studi sebelumnya baik pada beras, jagung, maupun minyak goreng sawit.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat. Ketergantungan masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap beras sebagai sumber utama konsumsi pangan menjadikan fluktuasi harga beras sebagai masalah yang langsung berdampak pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melaksanakan riset dengan judul "Peran Perum Bulog dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat" yang berfokus terhadap stabilitas harga beras.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditetapkan di Perum Bulog Kanwil NTB, Jl. Langko No. 110, Kota Mataram, selama Februari hingga April 2025. Data diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dengan pegawai Bulog dan mitra, serta dokumentasi yang relevan seperti data harga beras dan kebijakan pemerintah. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dikombinasikan dengan uji keabsahan data melalui pengujian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Data disajikan secara naratif dan deskriptif dengan dukungan tabel temuan serta kutipan langsung dari informan, untuk menggambarkan secara komprehensif peran Perum Bulog dalam mengendalikan fluktuasi harga beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga beras melalui berbagai kebijakan dan langkah operasional yang terintegrasi dan terstruktur. Melalui wawancara dengan Dwi Pratiwi Mayanda selaku Asisten Manajer Pelayanan Publik, disampaikan bahwa Perum Bulog tidak hanya menjaga ketersediaan stok beras secara optimal, tetapi juga aktif melakukan intervensi pasar dengan melaksanakan operasi pasar dan mendistribusikan beras SPHP secara langsung melalui pengecer, pasar modern, dan jaringan BUMN yang lain. Upaya tersebut bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga beras yang seringkali tidak stabil dan berpotensi membebani daya beli masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog juga bekerja sama dengan mitra lokal dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi beras serta menjamin ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau. Indah Riva selaku Asisten Manajer Manajemen Logistik menambahkan bahwa Perum Bulog mendapat dukungan distribusi dari anak perusahaan yaitu PT. Jasa Teknologistik yang mempermudah pengiriman beras ke berbagai wilayah, meskipun masih terdapat kendala di daerah terpencil seperti Kabupaten Lombok Utara yang akses jalannya kurang memadai dan preferensi masyarakatnya berbeda. Di sisi lain, Hatta Hasib Sani menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan stabilisasi harga beras dirasakan secara nyata terutama dalam kondisi darurat. Operasi pasar menjadi alat penting untuk menurunkan harga ketika terjadi lonjakan, dan keberhasilan operasi pasar tersebut terlihat dari perubahan harga di pasar dan meningkatnya daya beli masyarakat setelah intervensi dilakukan.

Selain itu, Reta Auliya menjelaskan bahwa dalam menjaga kestabilan harga, Perum Bulog

menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kondisi geografis yang mempengaruhi hasil panen serta kelancaran distribusi. Namun, melalui koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, satgas pangan, dan pemantauan harga secara rutin, Perum Bulog mampu memitigasi dampak dari hambatan-hambatan tersebut. Mitra Perum Bulog, seperti CV. Jaya Perdana, yang diwakili oleh Erlim Lindawati, mengapresiasi kebijakan Perum Bulog karena mampu memberikan harga pembelian yang stabil dan jaminan pasar untuk hasil panen, sehingga mitra tidak perlu khawatir dengan ketidakpastian harga di pasar bebas. Menurut Joya, staf mitra, kebijakan subsidi harga dan fasilitas infrastruktur seperti gudang dan transportasi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi dan kestabilan harga beras.

Di sisi lain, Perum Bulog juga menghadapi tantangan signifikan seperti kebijakan impor beras yang meskipun penting untuk menjaga ketersediaan stok nasional, dapat menekan harga beras lokal dan menurunkan daya saing produk petani domestik. Dalam wawancara, Indah Riva menegaskan bahwa keseimbangan antara kebutuhan impor dan perlindungan harga lokal menjadi perhatian utama Bulog untuk tetap menjaga stabilitas harga secara adil. Hambatan lain yang dihadapi termasuk manajemen stok di gudang dengan tingkat kelembaban tinggi yang membutuhkan pengawasan ketat agar kualitas beras tetap terjaga. Solusi yang diterapkan antara lain rotasi stok secara berkala dan optimalisasi sistem distribusi berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan peran Perum Bulog di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas harga beras. Upaya ini melibatkan sinergi antara sumber daya manusia yang berpengalaman, infrastruktur yang memadai, sistem distribusi yang efektif, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan strategi yang terkoordinasi dan responsif terhadap kondisi pasar, Perum Bulog berhasil menekan fluktuasi harga beras dan memberikan jaminan pasokan yang stabil bagi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan seperti aksesibilitas distribusi dan dampak kebijakan impor. Kinerja Perum Bulog dalam menjaga kestabilan harga beras menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah serta memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Perum Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti pengadaan rutin, operasi pasar, penyaluran beras SPHP, Raskin, dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terbukti efektif dalam menekan lonjakan harga dan mendukung daya beli masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bulog tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi sebagai BUMN, tetapi juga fungsi sosial dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Temuan ini memperkuat relevansi teori Kebijakan Publik dan Teori Pasar dalam memahami peran Bulog di NTB.
2. Stabilitas harga beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Perum Bulog didukung oleh faktor internal dan eksternal yang saling bersinergi. Faktor internal mencakup sumber daya manusia yang andal, keberadaan 16 gudang strategis, serta dukungan logistik dari anak perusahaan PT. Jasa Teknologistik. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan kebijakan pemerintah, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan koordinasi lintas sektor. Efektivitas

distribusi diperkuat oleh sistem transportasi yang memadai, meskipun tantangan tetap ada di wilayah terpencil. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di NTB ditopang oleh koordinasi erat antara Bulog, pemerintah daerah, mitra distribusi, dan petani lokal.

3. Kebijakan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam mengendalikan lonjakan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan utama seperti penyaluran beras SPHP, Operasi Pasar, dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dinilai efektif karena dilengkapi dengan pemantauan harga harian, evaluasi rutin, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan. Adaptasi strategi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta inovasi digitalisasi logistik dan kerja sama dengan e-commerce, menunjukkan langkah maju Bulog dalam memperluas jangkauan distribusi. Namun, efektivitas jangka panjang masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti produksi lokal, cuaca, dan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan seperti peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem distribusi digital untuk menjaga stabilitas harga beras di masa depan.
4. Perum Bulog di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas harga beras, yang bersumber dari faktor geografis, teknis, kebijakan, hingga eksternal seperti perubahan iklim dan pasar global. Kendala utama meliputi distribusi ke wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur, cuaca ekstrem, kebijakan impor, serta manajemen stok dan kualitas beras. Untuk mengatasi tantangan ini, Bulog menerapkan strategi seperti penyesuaian metode distribusi lokal, kerja sama dengan pemerintah desa, pemanfaatan jaringan transportasi anak perusahaan, serta rotasi dan pemantauan stok yang ketat. Meskipun impor beras penting untuk menjaga pasokan, kebijakan ini perlu diimbangi agar tidak merugikan petani lokal. Perubahan iklim dan dinamika pasar global semakin menambah tantangan, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan termasuk digitalisasi distribusi untuk menjamin stabilitas harga dan keterjangkauan beras bagi masyarakat NTB.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pangan Nasional. (2022). *Panel Harga Pangan*. Badan Pangan Nasional.
- Bulog. (2023). *Bulog Gelontorkan 100 Ton Beras per Hari di NTB*. Republika.
- Fadhlurrahman, I. (2024). Harga Beras Premium di Nusa Tenggara Barat Tiga Bulan Terakhir Naik 0,95%.
- Iqbal, S. (2023). Bale Lumbung Padi Sebagai Role Model Ketahanan Pangan Masyarakat Nusa Tenggara Barat. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 2(01), 1–12.
- Proborini, A., Ekowati, T., & Sumarjono, D. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di DKI Jakarta Anita Proborini 1 , Titik Ekowati 1 , Djoko Sumarjono 1 1. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4(1), 38–49.
- Rachman, A., Badan, S., Fiskal, K. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia's Food Security Strategy. *In Jejaring Administrasi Publik*.
- Setyawan, A., & Alamanda, A. E. (2023). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro*. 6(1), 123–134.
- Sipahutar, R. L. P., Sirait, N. N., Saidin, O., & Sukarja, D. (2023). Peran Pemerintah Terhadap

Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Siddik, M., & Zaini, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah sebagai Instrumen Stabilisasi Harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat *The Effectiveness of the Government's Procurement Price Policy for Paddy and Rice as a Price Stabilization Instrument in Lombok Island West Nusa Tenggara. Analisis Kebijakan*